



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2003) menjelaskan bahwa manajemen keuangan ialah “Manajemen yang berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Manajer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha, yang berkaitan dengan keuangan atau non keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, profit atau non profit. Mereka melakukan berbagai kegiatan, seperti anggaran, perencanaan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisa investasi dan usaha memperoleh dana”. Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut Horne dan Wochowiez (2012) mendefinisikan “Manajemen keuangan adalah segala aktivitas hubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan. (Fauzan & Defitri Rusdiyanti, 2022)

Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan serta mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan. Manajemen keuangan berkaitan dengan bagaimana mengelola arus kas, investasi, dan pendanaan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan (Mataris et al., 2022).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya, manajemen keuangan adalah salah satu bagian di dalam teori akuntansi atau konsep dasar akuntansi. Walaupun begitu, ilmu manajemen keuangan masih sangat luas. Beberapa ahli mendefinisikan manajemen keuangan sebagai berikut:

Irfani (2020) mendefinisikan manajemen keuangan “sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan”.

Utari, Purwanti and Prawironegoro (2014), memberikan pengertian tentang manajemen keuangan yaitu” aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan secara efektif, efisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba”.

Kasmir (Kasmir, 2015) menjelaskan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Memperoleh dana untuk membiayai usaha,
- b. Mengelola dana seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan,
- c. Mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien.

Riyanto (2008), mendefinisikan manajemen keuangan sebagai “seluruh aktivitas usaha dalam mendapatkan pendanaan dengan biaya seminimal mungkin dengan syarat yang paling menguntungkan dan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2 Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Ramadhan dan Syarfana (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai keadaan, posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam satu periode. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Menurut Harjito dan Martono (2011), Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Sedangkan menurut Harahap (2011), Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. (Hanafi, 2018)

Menurut Harmono (2015) analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi kesehatan perusahaan, dengan menganalisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan, baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Dari hasil analisis tersebut akan didapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan.



Sehingga hasilnya sangat penting bagi usaha tersebut untuk melangkah kedepannya, melakukan perbaikan dan sebagai alat evaluasi.

b. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel dalam satu periode pelaporan. Laporan ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Adapun jenis dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah meliputi tujuh komponen utama sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode, serta perbandingannya dengan anggaran. Laporan ini membantu menilai sejauh mana pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan ini menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode pelaporan. Saldo anggaran lebih mencerminkan sumber daya yang belum digunakan dan menjadi salah satu indikator kinerja fiskal.



3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi dalam neraca digunakan untuk menilai kemampuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan informasi tentang seluruh aktivitas operasional pemerintah daerah yang bersifat non-anggaran. Laporan ini menunjukkan kinerja ekonomi melalui pendapatan dan beban dalam satu periode.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan ini penting untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas yang berasal dari surplus/defisit operasional, koreksi kesalahan periode sebelumnya, dan perubahan kebijakan akuntansi. Laporan ini mencerminkan perubahan kekayaan bersih pemerintah daerah.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK memberikan penjelasan naratif, rincian tambahan, serta informasi yang relevan terhadap pos-pos dalam laporan keuangan utama.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Definisi Analisis Laporan Keuangan

Menurut Hery (Hery, 2016) menyatakan bahwa: “Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri”.

Menurut Harahap (2018) analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih sederhana dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara suatu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif yang bertujuan untuk memberitahu kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan mencakup posisi keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Manfaat melakukan analisis laporan keuangan sendiri yaitu untuk mengetahui serta mengevaluasi kinerja efektivitas keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah kegiatan menguraikan pos-pos laporan keuangan dan melihat hubungan antar komponen di dalam laporan keuangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan perusahaan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan suatu keputusan bisnis maupun investasi.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Rahmawati, (2016) dalam Srianingsih Y, Fauzan M dan Rifai A (2023) mengemukakan tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan alat seleksi pertama untuk menentukan alternatif investasi. Alat seleksi (screening) yang sering digunakan oleh investor untuk berinvestasi.
2. Merupakan alat peramalan situasi dan kinerja keuangan di masa depan. Analisis laporan keuangan mempunyai peranan yang sangat penting tujuan penting sebagai alat prediksi keuangan perusahaan di masa depan, hal ini juga sering digunakan oleh investor kapan mereka ingin berinvestasi.
3. Sebagai proses diagnosa masalah manajemen, operasional atau masalah lainnya.
4. Sebagai alat penilaian manajemen perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui jika tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menampilkan data informasi tentang kondisi keuangan perusahaan atau kondisi manajemen perusahaan.

Manfaat pengukuran kinerja yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. objektif.

2.1.3 Rasio Keuangan

a. Pengertian Rasio Keuangan

Darmansyah (2013) mengartikan rasio keuangan daerah sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan membandingkan berbagai komponen dalam laporan keuangan daerah. Rasio ini mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan (Susanto, 2019)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rasio keuangan daerah adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan daerah dengan membandingkan angka-angka tertentu dalam laporan keuangan daerah, seperti pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Rasio ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Digdowiseiso & Alfian, 2023).

Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya (Horne, 2008) (Mailangkay et al., n.d.)

b. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah (Halim, 2007) yang meliputi:

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim, 2007). Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
≥60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Efektivitas yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu menggali potensi pendapatan daerah secara optimal.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Ropa et al., n.d.)

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2016).

Penghitungan rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2
Tahun Kriteria penilaian efisiensi
menurut Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
>90% - 100%	Kurang Efisien
>80% - 90%	Cukup Efisien
≥60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien. Tingkat efisiensi yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan output maksimal dengan penggunaan *input* yang minimal.

c. Pengelola Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu, pertama Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 9 (2) Desember 2019: 92-10095 ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kedua, Pelaksanaan dan Penata usahaan yang meliputi Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, administrasi Pembukuan, kewajiban pajak. Ketiga, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang meliputi laporan realisasi anggaran desa per sumber anggaran, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun, laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

anggaran. Keuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik (public goods) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Herlianto, 2017). Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017), yaitu pertama, dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa. Kedua, dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM aparat desa yang baik. Ketiga, bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup. Keuangan Desa dilihat ruang lingkup pengelolaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/ kota. Dengan jumlah yang terbatas maupun kapasitas aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan akuntabilitas

2.1.4 Kinerja Keuangan Desa

Menurut Fahmi dalam Cipta et al. (2020), “kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

baik dan benar”. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Dalam konteks pemerintahan desa, kinerja keuangan desa dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup kegiatan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut (Mahmudi, 2016), penilaian kinerja keuangan sektor publik bertujuan untuk mengetahui apakah sumber daya yang dikelola pemerintah telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, kinerja keuangan juga dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan dan belanja desa, serta efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan anggaran tersebut. Indikator utama yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan desa antara lain:

- a. Efektivitas: sejauh mana realisasi pendapatan dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan.
- b. Efisiensi: sejauh mana pengeluaran (belanja) dilakukan secara hemat dan tidak melebihi pendapatan.
- c. Transparansi dan akuntabilitas: sejauh mana pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan kata lain, kinerja keuangan desa yang baik tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian angka-angka keuangan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.5 Efektivitas Keuangan

Efektivitas keuangan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah maupun desa. Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, efektivitas mengukur sejauh mana pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan rencana anggaran.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018), efektivitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target-target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin berhasil pemerintah desa dalam mengelola pendapatan secara optimal.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Target Pendapatan}) \times 100\%$$

Interpretasi dari hasil perhitungan rasio efektivitas secara umum adalah sebagai berikut:



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- $> 100\%$ = Sangat Efektif
- $90-100\%$ = Efektif
- $80-90\%$ = Cukup Efektif
- $60-80\%$ = Kurang Efektif
- $< 60\%$ = Tidak Efektif

Dengan melakukan pengukuran efektivitas, pemerintah desa dapat mengetahui apakah strategi penarikan pendapatan desa, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, pendapatan asli desa (PADes), dan sumber lainnya, telah berjalan sesuai rencana atau perlu evaluasi.

Analisis Efektivitas Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Sementara Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Georgopolous dan Tannbaum dalam bukunya yang berjudul efektivitas organisasi (1985) mengemukakan bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Secara sederhana efektivitas merupakan outcome dengan output. Rasio efektivitas keuangan daerah (selanjutnya disebut “rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

potensi riil daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$RE = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$
ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Devinci et al., 2023b).

2.1.6 Efisiensi Keuangan

Efisiensi keuangan adalah ukuran kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal, sehingga mampu menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal. Efisiensi berfokus pada hubungan antara input (anggaran yang digunakan) dan output (hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program).

Menurut (Mahmudi, 2016), efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara input dan output dalam suatu kegiatan. Dengan kata lain, efisiensi menunjukkan sejauh mana anggaran yang tersedia digunakan secara hemat dan tidak boros, tetapi tetap menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left(\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

Interpretasi dari hasil perhitungan rasio efisiensi secara umum adalah:



< 60% = Sangat Efisien

60–90% = Efisien

> 90% = Tidak Efisien

Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah desa karena anggaran digunakan secara hemat. Oleh karena itu, efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai apakah pengeluaran desa sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

2.1.7 Indikator Kinerja Keuangan

Indikator kinerja keuangan digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Dua indikator utama yang umum digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana realisasi pendapatan desa mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Semakin besar rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja keuangan desa dalam mengoptimalkan pendapatannya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria Umum Efektivitas (Mahsun, 2012)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % keatas	Sangat Efektif
90 % - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa dapat menggunakan anggaran secara hemat dan tepat sasaran. Rasio ini membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Kriteria umum efisiensi (Permendagri
No. 690.900-327 Tahun 1996, dalam Nian Tana Sikka)

Kriteria Efisiensi (%)	Persentase Efisiensi
>100 %	Tidak Efisien
90 % - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisiensi
≤ 60%	Sangat Efisien

Dengan menggunakan kedua indikator tersebut, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangannya secara kuantitatif dan objektif, sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan keuangan di masa mendatang.



2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya mengenai Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang /Tahun/Judul/identitas jurnal	Variabel Penelitian danAlat Analisis data	Hasil Penelitian
1.	Hery Susanto (2019) Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Metode analisis data pada penelitian ini ialah rasio keuangan(x) kinerja keuangan daerah (y) Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, aktifitas, dan rasio pertumbuhan,	Rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada Komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah.
2.	1.Federicky Manimbaga 2. Jullie J. Sondakh 3.Sherly Pinatik (2019) Analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah pemerintah kota bitung tahun anggaran 2014-2018	Motode analisis data pada penelitian ini ialah tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan rasio nya adalah efektivitas dan efisiensi	Kinerja keuangan daerah untuk tingkat efektivitas pada Pemerintah Kota Bitung selama periode tahun anggaran 2014-2018 terbagi atas dua kriteria yaitu efektif untuk tahun 2014 dan 2017, sedangkan cukup efektif pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Sedangkan kinerja keuangan daerah untuk tingkat efisiensi pada Pemerintah Kota Bitung untuk tahun 2014- 2018 pada umumnya sudah masuk kriteria efisien hanya pada tahun 2015 dan 2018 tergolong tidak efisien.
3.	Syaripah Rahmawati Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017 Menggunakan Data	Motode analisis data pada peneliatian ini ialah faktor-faktor efisiensi umum syariah.(X1) pendekatan intermediasi dengan asumsi VRS dan orientasi output.(X2) kinerja	Tingkat Bank Umum Syariah periode 2014-2017 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi, berasumsi VRS dan berorientasi output secara individu menunjukkan hasil bahwa dari delapan bank terdapat tiga Bank Umum Syariah

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang /Tahun/Judul/i dentitas jurnal	Variabel Penelitian danAlat Analisis data	Hasil Penelitian
	Envelopment Analysis (DEA)	keuangan daerah (y) Alat analisis data menggunakan data envelopment analisis (DEA).	yang mampu menghasilkan serta memperthankan score efisien secara maksimum mencapai 100% selama periode pengamatan.
4.	Ahmad Ali Syahputa,Mujibur Rahmat (2021) Analisis Efektivitas,Efisiensi i Dan Ekonomi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Metode analisis data pada penelitian ini adalah tingkat ekonomi selama 5 tahun terakhir(x) kinerja keunagan(y) Alat analisis data menggunakan analisis deskriptif	Untuk tingkat ekonomi selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan,tetapi denganperununan yangterjadi kinerja keuangan tetap Memenuhi kriteria ekonomis.
5.	Arinda Nur AlifahFebriyanti. (2022) Analisis Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengukuran Kinerja Keuangan DKI JAKARTA Tahun 2019-2020	Metode analisis data pada penelitian ini tingkat efektivitas pemerintah(x1) Tingkat efisiensi kinerja pemerintah (x2) Kinerja pemerinta DKI Jakarta, (y) Alat analisis data menggunakan analaisis deskriptif	Pengukuran efektivitas kinerja pemerintah DKI Jakarta tahun 2019 Termasuk kategori Sangat efektif kemudian tahun 2020 termasuk kategori cukup efektif. Berdasarkan hasil analisis penelitian pengukuran efisiensi kinerja pemerintah DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan rata rata efisien namun pada 2020 termasuk kategori kurang efisien

Sumber: Data diolah penulis, 2025

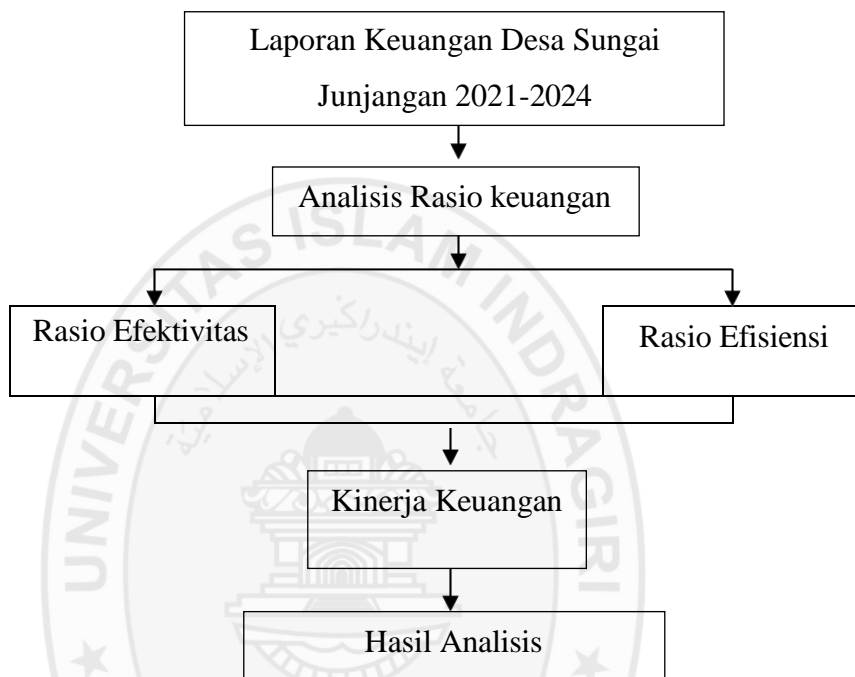
2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Junjangan dievaluasi melalui laporan keuangan tahunan dengan menggunakan pendekatan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah desa mampu merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan rasio efisiensi mengukur kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan biaya yang minimal. Kedua rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

khususnya pada periode 2021–2024 di Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka. Penerapan analisis rasio efektivitas dan efisiensi memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait capaian kinerja keuangan desa selama periode tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dan ditentukan oleh peneliti untuk dikaji serta dianalisis guna mendapatkan informasi yang relevan. Menurut (Sugiyono, 2016) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu efektivitas keuangan (X_1), efisiensi keuangan (X_2), dan kinerja keuangan pemerintah desa (Y).

Penjelasan masing-masing variabel disajikan dalam tabel operasional variabel berikut ini.

Tabel 2.6
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel Penelitian	Pengertian	Rumus	Skala
1.	Kinerja Keuangan (Y)	Menggambarkan kondisi keuangan desa berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan. (Mahmudi, 2016).	1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Efisiensi	Ratio
2.	Rasio Efektivitas (X_1)	Mengukur kemampuan desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai target (Mahsun, 2012).	Rasio Efektivitas $= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$	Ratio
3.	Rasio Efisiensi (X_2)	Menilai kemampuan desa menggunakan anggaran secara hemat dan optimal (Permendagri No. 690/1996).	Rasio Efisiensi $= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$	Ratio

Sumber: Data olahan penulis, 2025